

**Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan di Dinas
Pertanian dan Perikanan Kota Medan**

**Implementation of Policy for Implementing Fisherman Insurance Cards at the
Department of Agriculture and Fisheries of Medan City**

Ira Dwi Hastuti¹, Mujahiddin²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan,
Indonesia

email: iradwihastuti5@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of policies for the implementation of fisherman insurance cards at the Department of Agriculture and Fisheries in Medan City. Data collection techniques through interviews. From the research results obtained; The implementation of the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 16 of 2016 concerning fisherman cards in article 6 states that the ministry and local governments organize fisherman cards as part of the implementation of duties and functions in the protection and empowerment of fishermen. The Department of Agriculture and Fisheries of Medan City has carried out its authority in accordance with the regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 16 of 2016. The fisherman card is expected to be able to have an impact on the lives of fishermen. and fisherman cards, so that fishermen are only limited to having a fisherman's card

Keywords: Implementation Policy, Fisherman Insurance Card

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan Di Dinas Pertanian dan Perikanan di Kota Medan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Dari hasil penelitian didapatkan; Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang kartu nelayan pada pasal 6 menyebutkan bahwa kementerian dan pemerintah daerah menyelenggarakan kartu nelayan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan sudah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tertulis dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016. Kartu nelayan diharapkan agar mampu memberi dampak yang berpengaruh bagi kehidupan nelayan, Dampak yang diharapkan belum mampu dimanfaatkan sebagian nelayan dengan keterbatasan terhadap fungsi dan kegunaan dan kartu nelayan, sehingga nelayan hanya sebatas memiliki kartu nelayan. Dari segi fungsi kartu nelayan memang dapat mengakses bantuan dari pemerintah tetapi bantuan kadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kata Kunci: Kebijakan Penyelenggaraan, Kartu Asuransi Nelayan

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayah perairannya cukup luas, dengan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dapat menjadi andalan untuk mendukung pembangunan nasional. Meskipun Indonesia negara kepulauan tetapi hanya sebagian kecil dari penduduknya yang berdiam hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan pesisir. Nelayan merupakan salah satu bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan

Article Submitted: Oktober 8th, 2022, Revised: November 10th, 2022, Accepted: November 18th, 2022
paling rendah yang ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial budaya, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) disebabkan rata-rata para nelayan hanya lulus sekolah dasar yang hanya bisa mengandalkan keahlian yang terbatas. Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan nelayan berdampak kepada keluarga Nelayan yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil usaha perikanan. Potensi sumber daya manusia nelayan pada khususnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan nasional dimasa yang akan datang. Ketersediaan sumber daya manusia juga mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap pembangunan ekonomi termasuk untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di pesisir.

Penangkapan ikan merupakan salah satu aktivitas para nelayan yang memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi untuk terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan nelayan mengalami cacat maupun perawatan bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Bahaya yang berdampak bagi keselamatan nelayan di antaranya cuaca ekstrim (ombak), terpeleset/tergelincir (lantai kapal yang licin), mekanik (tertusuk duri ikan), *struck against* (tergores karang), kimiawi (bahaya oli dan bahan bakar), ledakan (tekanan udara yang tinggi pada tabung kompresor), kimia (karat, korosif), tekanan udara tinggi, tuas starter yang licin, batu karang, mekanis (gigitan biota laut), *mechanical failure* (selang lapuk, menekuk dan bocor), tubuh tersangkut baling-baling kapal, *visibility* yang buruk dan fenomena alam. Kesemuanya ini tentu akan mempengaruhi pola keselamatan dan kesejahteraan dari para nelayan. Oleh karena itu, para nelayan Indonesia harus mendapatkan jaminan berupa perlindungan asuransi yang dapat mengurangi beban dari nelayan tersebut jika mengalami kecelakaan maupun musibah selama dalam aktivitasnya bekerja di laut.

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program bantuan kepada nelayan agar tepat sasaran, perlu melakukan indentifikasi terhadap para nelayan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016, maka diperlukannya adanya upaya penyelenggaraan kartu asuransi bagi nelayan. Pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016, menurut pasal 6 ayat (1) Kementerian dan pemerintah daerah menyelenggarakan kartu nelayan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Program penyelenggaraan kartu asuransi nelayan telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Namun, masih menemukan beberapa masalah, diantaranya kendala sosialisasi kepada nelayan dikarenakan beberapa nelayan masih belum memahami program ini, kurangnya staf atau sumber

Article Submitted: Oktober 8th, 2022, Revised: November 10th, 2022, Accepted: November 18th, 2022
daya manusia yang dibutuhkan untuk melakukan pendataan kepada nelayan, tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dikarenakan setiap tahun akan ada pengawasan dan evaluasi dari pusat. Maka untuk mengatasi permasalahan ini dibuatlah program penyelenggaraan kartu asuransi nelayan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016.

Dasar pemikiran diperlukannya asuransi bagi nelayan adalah karena asuransi sebagai lembaga keuangan non bank memiliki fungsi sebagai sarana pengalihan risiko kerugian yang terjadi pada nelayan. Dengan asuransi, diharapkan nelayan terhindar dari risiko kerugian akibat cuaca buruk di laut, kecelakaan kapal, kondisi lingkungan laut yang tercemar, yang semua risiko itu dapat berakibat pada kecelakaan bagi nelayan, kondisi cacat raga, dan pada akhirnya dapat berdampak pada berkurangnya atau hilangnya penghasilan yang digunakan untuk menghidupi keluarga para nelayan yang mengalami hal tersebut. Dengan perlindungan asuransi tersebut, nelayan akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usahanya sehingga dapat memusatkan perhatian pada penangkapan ikan yang lebih baik, lebih aman dan lebih menguntungkan.

Analisis kebijakan kesehatan menjelaskan implementasi (Ayuningtyas, 2018) sebagai sebuah kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran (*target group*) untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Dunn (Nur Furqon, 2020) mengatakan, kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan, seperti pertanahan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Penyelenggaraan (Hasibuan, 2011) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif di delegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita ambil kesimpulan, bahwa penyelenggaraan merupakan proses awal untuk menempatkan orang-orang baik individu maupun kelompok dalam

Article Submitted: Oktober 8th, 2022, Revised: November 10th, 2022, Accepted: November 18th, 2022
struktur organisasi demi mencapai tujuan organisasi tersebut. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Kartu nelayan adalah kartu identitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan.

Asuransi (Abbas Salim, 2007) ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Bilamana kita melihat cabang-cabang perusahaan asuransi yang ada di negara kita, maka bentuk-bentuk asuransi dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Asuransi kerugian (asuransi umum), yaitu mengenai hak milik, kebakaran, dan lain-lain.
- b. Asuransi varia (*marine insurance*, asuransi kecelakaan, asuransi mobil dan pencurian).
- c. Asuransi jiwa (*life insurance*), yaitu yang menyangkut kematian, sakit, cacat, dan lain-lain.

Kartu asuransi (Riyanto, 2012) merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Nelayan dalam Ensiklopedia Indonesia dinyatakan sebagai orang-orang yang secara aktif melakukan penangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencaharian. Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi melakukan penangkapan ikan dan tanaman. Orang yang hanya melakukan pekerjaan, seperti membuat jaring, pengangkut alat-alat atau perlengkapan dalam perahu/kapal, pengangkut ikan dari perahu/kapal tidak dimasukkan sebagai nelayan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2016), asuransi bagi nelayan adalah perjanjian antara nelayan dan pihak pelaksana Perusahaan Asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko.

Ketidakpastian cuaca di laut atau faktor lain membuat negara-negara yang memiliki sumber daya ikan yang banyak, berpikir untuk memberikan solusi bagi para nelayannya agar tidak mengalami kerugian dengan mengasuransikan risiko yang akan mereka hadapi di laut.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Kerangka konsep yang dibuat oleh peneliti implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 16 Tahun 2016 memiliki gambaran untuk melakukan penyelenggaraan kartu asuransi nelayan dengan melakukan suatu proses, tindakan dalam memberikan pelayanan, tujuan dalam program penyelenggaraan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Agar terwujudnya tujuan pemerintah guna untuk melindungi

Article Submitted: Oktober 8th, 2022, Revised: November 10th, 2022, Accepted: November 18th, 2022
setiap individu nelayan. Maka, dilakukan sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 16 Tahun 2016. Kategorisasi berhubungan dengan bagaimana subjek dan objek penelitian ini. Kategorisasi yang ditentukan merupakan campuran dari beberapa indikator yang sudah peneliti lakukan.

No	Kategorisasi	Indikator
1.	Implementasi Kebijakan Publik	<ul style="list-style-type: none">● Adanya Komunikasi● Adanya Tindakan● Adanya Sumberdaya● Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan
2.	Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan	<ul style="list-style-type: none">● Pelayanan Kesehatan● Bantuan Sosial● Kesejahteraan

Sumber data ini didapatkan melalui wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber ataupun responden yang berkaitan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan. Jalan Kramat Indah Nomor 4 Kelurahan Selambo Amplas Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Dengan rentang waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan September 2022.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas dan diuraikan hasil penelitian di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan Kota Medan. Berikut adalah penyajian data berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber informasi yang menggunakan paduan wawancara, berdasarkan kategorisasi penelitian yang sudah ditentukan. Program kartu nelayan dibuat oleh kementerian kelautan dan perikanan dalam usaha memberikan perlindungan dan kemudahan bagi nelayan yang berada di daerah pesisir agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan memudahkan untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan. Mengingat program kartu nelayan merupakan program dari kementerian kelautan dan perikanan

Article Submitted: Oktober 8th, 2022, Revised: November 10th, 2022, Accepted: November 18th, 2022
maka kewenangan untuk melaksanakan program ini diserahkan kepada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

Selanjutnya Dinas Pertanian dan Perikanan harus menjalankan program sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan melakukan sebuah tindakan yang dijalankan untuk melancarkan program kartu asuransi nelayan. Terlaksananya tindakan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan dapat dilihat dari usaha para pegawai dalam memaksimalkan tugas yang diberikan kepadanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Friska selaku kepala bidang perikanan tangkap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan pada tanggal 19 September 2022 mengatakan bahwa dalam melaksanakan program kartu asuransi nelayan yang diberikan oleh BPAN (Bantuan Premi Asuransi Nelayan) kepada nelayan tertera risiko-risiko apa saja yang dijamin oleh program BPAN tersebut Dinas Pertanian dan Perikanan mengusulkan kegiatan melalui APBD Kota Medan. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan mempunyai anggota penyuluh di setiap wilayah perikanan, sosialisasi kepada kepala desa dan camat setelah melakukan sosialisasi para pegawai penyuluh identifikasi dan pendataan terhadap nelayan. Untuk pendistribusian kartu nelayan juga dilakukan melalui berbagai kecamatan dan kepala desa maupun secara langsung kepada nelayan.

Sama halnya dengan bapak Rudi selaku sub koordinator lingkup prasarana dan sarana penangkap ikan pada tanggal 19 September 2022 mengatakan bahwa para pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan melakukan sosialisasi terhadap nelayan. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberitahukan kepada lurah atau kepala lingkungan serta melakukan penyuluhan terhadap nelayan. Sedangkan untuk pendataan dan pendistribusian kartu nelayan dilakukan mensosialisasikan datang ke wilayah yang tinggal di pesisir. Begitu juga hasil wawancara pada tanggal 22 September 2022 dengan kakak keko yang bekerja sebagai pengklaim kartu asuransi nelayan menjelaskan bahwa nelayan tidak mengetahui tujuan dari program BPAN. Hal ini tidak lain juga dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang BPAN ini, baik itu yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan itu sendiri maupun yang dilakukan oleh penyuluh lapangan. Dan juga dikarenakan banyaknya nelayan yang tidak tergabung ke dalam kelompok nelayan yang menyebabkan nelayan tersebut kurang mengetahui info-info mengenai program BPAN ini dan juga info tentang lainnya.

Sementara hasil dari wawancara pada tanggal 23 September 2022 dengan bapak ester yang bekerja sebagai nelayan mengatakan para pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan sosialisasi terhadap nelayan. Para pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan juga melakukan identifikasi dan pendataan terhadap masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Sedangkan untuk

Article Submitted: Oktober 8th, 2022, Revised: November 10th, 2022, Accepted: November 18th, 2022 mendistribusikan kartu nelayan para pegawai Dinas mendistribusikannya melalui kepala desa dan koperasi nelayan. Untuk mempermudah dalam melaksanakan program kartu asuransi nelayan terhadap nelayan-nelayan yang berada di daerah pesisir dibutuhkan kerjasama antara Dinas Pertanian dan perikanan Kota Medan dengan stakeholder yang berada di tiga kecamatan. Dinas Pertanian dan perikanan menjalin kerjasama dan komunikasi agar mampu memaksimalkan program kartu asuransi nelayan secara menyeluruh. Berdasarkan wawancara dengan ibu friska selaku kepala bidang perikanan tangkap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan pada tanggal 19 September 2022 mengatakan bahwa Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan bekerjasama dalam bentuk surat pemberitahuan tentang kartu asuransi nelayan kepada camat dan diteruskan kepada kepala lingkungan agar mampu menyampaikan hal yang menyangkut sosialisasi dan penyuluhan kepada nelayan. Dalam menjalin kerjasama dengan stakeholder yang berada di tiga kecamatan tersebut agar kartu nelayan tepat sasaran dengan tujuan diberikan kepada yang benar-benar memiliki pekerjaan sebagai nelayan.

Hasil wawancara bapak rudi selaku sub koordinator lingkup prasarana dan sarana penangkapan ikan pada tanggal 19 September 2022 mengatakan pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan sudah bekerjasama untuk melancarkan program kartu asuransi nelayan, dan masukan yang didapat agar kartu asuransi nelayan benar-benar yang dapat bekerja nelayan sesuai kriteria. Selanjutnya wawancara kepada bapak feri dan ester yang bekerja sebagai nelayan mengatakan Dinas Pertanian dan perikanan mampu mensosialisasikan dengan baik sehingga kartu asuransi diberikan kepada yang layak untuk mendapatkan premi tersebut. Untuk hasil wawancara dengan Ira bekerja sebagai penyuluhan mengatakan bahwa kerjasama sudah terjalin dengan baik oleh pihak Dinas Pertanian dan Perikanan kepada masing-masing kecamatan agar kartu nelayan dapat dimiliki sepenuhnya secara fisik oleh para nelayan agar dapat segera mengakses bantuan yang diharapkan nelayan.

Program kartu nelayan akan berjalan dengan lancar dan maksimal apabila didukung dengan ketersediaan sumberdaya yang dapat berupa sarana – prasarana dan sumber daya manusia yang menjalankan tugas dan fungsinya secara bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan kebutuhan menyangkut fasilitas pendukung dalam merealisasikan kartu nelayan. Berdasarkan wawancara dengan Friska selaku kepala bidang perikanan tangkap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan pada tanggal 19 September 2022 mengatakan bahwa untuk ketersediaan prasarana dan sarana untuk mendukung program kartu nelayan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan hanya sebagai

Article Submitted: Oktober 8th, 2022, Revised: November 10th, 2022, Accepted: November 18th, 2022
pengumpul data dan menginput data serta pendistribusi kartu nelayan sedangkan untuk sarana fasilitas pencetakan kartu berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Untuk dukungan anggaran atau hanya sebatas biaya sosialisasi, pengumpul data dan pendistribusian kartu sedangkan untuk anggaran pengadaan kartu nelayan ini semuanya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, hal ini karena program dari kementerian kelautan dan perikanan. Dalam menjalankan tanggung jawabnya pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan hanya sebatas memfasilitasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengumpulan data, penginput data dan pendistribusian kartu nelayan. Sama halnya dengan Rudi selaku sub koordinator lingkup prasarana dan sarana penangkapan ikan pada tanggal 19 September 2022 mengatakan pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan sebatas pelaksana program, Para pegawai hanya sebagai fasilitator mengumpulkan data, menginput data dan mendistribusikan kartu kepada nelayan, dukungan anggaran dan staff yang dimiliki Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan masih kurang sehingga pendataan dan verifikasi nelayan terbilang lambat.

Begitu juga dengan pernyataan narasumber Keko dan Ira mengatakan semua pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan yang diberi kewenangan untuk menjalankan program kartu asuransi nelayan hanya melaksanakan tugas untuk sosialisasi, pendataan dan pembagian kartu nelayan kepada nelayan. Untuk anggaran dan biaya langsung dibiayai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Adanya program Kartu Nelayan yang dibuat Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bermaksud untuk memberikan kemudahan bagi nelayan dalam bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada nelayan. Aspek-aspek yang mempengaruhi bagi kehidupan nelayan yang diperoleh dari program kartu nelayan berupa perlindungan dan identitas yang menjamin kehidupan nelayan serta bantuan-bantuan berupa asuransi nelayan yang diperoleh dari pemerintah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang kartu nelayan pada pasal 6 menyebutkan bahwa kementerian dan pemerintah daerah menyelenggarakan kartu nelayan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Berdasarkan hasil penelitiannya, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan sudah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tertulis dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016. Adanya tindakan dalam menjalankan program implementasi kartu nelayan dilakukan dengan sosialisasi fungsi kartu nelayan, identifikasi dan pendataan kebutuhan nelayan sampai dengan distribusi kartu nelayan. Tindakan ini dilakukan dengan langsung kelapangan maupun secara tidak langsung melalui pemberitahuan kepada camat atau kepala lingkungan di setiap

Article Submitted: Oktober 8th, 2022, Revised: November 10th, 2022, Accepted: November 18th, 2022
kecamatan Kota Medan. Untuk komunikasi yang dijalin Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dengan *stakeholder* di tiga kecamatan sudah dilakukan dengan maksimal dan dengan adanya komunikasi Dinas Pertanian dan Perikanan menerima masukan keluhan dari nelayan agar program kartu nelayan diberikan sesuai tepat sasaran.

Ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan program kartu asuransi nelayan dari hasil penelitian belum memadai disebabkan staff yang dimiliki Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan pendataan dan verifikasi nelayan terbilang lambat. Kartu nelayan diharapkan agar mampu memberi dampak yang berpengaruh bagi kehidupan nelayan, Dampak yang diharapkan belum mampu dimanfaatkan sebagian nelayan dengan keterbatasan terhadap fungsi dan kegunaan dan kartu nelayan, sehingga nelayan hanya sebatas memiliki kartu nelayan. Dari segi fungsi kartu nelayan memang dapat mengakses bantuan dari pemerintah tetapi bantuan kadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada semua pihak-pihak yang selalu memberi nasihat, bimbingan, serta dukungan. Penulis memohon kritik dan masukan kiranya agar dapat memperkaya peneliti lainnya sesuai dengan tema dan topik yang relevan dengan penelitian yang telah diuraikan

Daftar Pustaka

- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ayuningtyas, Dumilah. 2018. *Analisis Kebijakan Kesehatan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Rianto, M Nur. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.